

## **Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kapasitas Individu, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo 2021**

**Moh. Abdan Syakur Buhungo**  
IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Email: [abidbuhungo@gmail.com](mailto:abidbuhungo@gmail.com)

**Sri Dewi Yusuf**  
IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Email: [sridewi73yusuf@gmail.com](mailto:sridewi73yusuf@gmail.com)

Alamat: Jalan Sultan Amay, Pone, Kec. Limboto Bar., Kabupaten Gorontalo,  
Gorontalo 96181; Phone: (0435) 880251  
Korespondensi penulis: [abidbuhungo@gmail.com](mailto:abidbuhungo@gmail.com)

***Abstract.** This study examines the effect of individual capacity budgeting participation, and clarity of budget targets on village budget lengths in the Central City District of Gorontalo City. Selection of samples using the purposive sampling method. The data used in this study was in the form of primary data with data collection techniques by distributing questionnaires to 43 respondents in 6 Villages in Gorontalo City District. The data analysis technique used is moderation regression analysis. The results showed that budgeting participation had a positive effect on budget lengthening. Meanwhile, clarity of budget goals and individual capacity cannot moderate the relationship of budgeting participation to budget lengths.*

***Keywords:** Budget Length, Budget Participation, Clarity of Budget Goals, Individual Capacity*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penganggaran Kapasitas Individu, Kejelasan sasaran Anggaran terhadap senjangan anggaran Desa di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 43 responden pada 6 Kelurahan Di Kecamatan Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Sementara, Kejelasan Sasaran anggaran dan kapasitas individu tidak mampu memoderasi hubungan partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran.

**Kata kunci:** Kapasitas Individu, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Senjangan Anggaran

### **LATAR BELAKANG**

---

Received November 30, 2022; Revised Desember 22, 2022; Accepted Januari 24, 2023

\*Corresponding author, e-mail [abidbuhungo@gmail.com](mailto:abidbuhungo@gmail.com)

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa diatur dalam Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 yaitu desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh aparatur desa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya harus mengelola keuangan dan aset desa dengan akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan proses penganggaran. anggaran merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, hal ini dikarenakan anggaran merupakan alat untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi wewenangnya dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anggaran tersebut.

Secara yuridis formal desa diakui dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan aturan yang ada maka desa memiliki pengertian sebagai keatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta menurus kepentingan masyarakat setempat. (Sahabi, A., Yusuf, S. D., Mohamad, R., & Syawaluddin, S. 20220

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dikategorikan sebagai sebuah proses yang tergolong cukup rumit, hal ini dikarenakan anggaran pada sektor publik bukan hanya memuat rencana tahunan saja, namun juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan publik yang dibebankan kepada pihak pemerintah daerah.

Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku individu yang menyusun. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan rawan terjadinya senjangan anggaran. Dunk dan Parera (1997) dalam

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa senjangan anggaran merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan, realisasi biaya dan pengeluaran. Senjangan dalam anggaran terjadi apabila realisasi pendapatan cenderung melebihi target yang ditetapkan dari anggaran dan realisasi belanja cenderung dibawah target yang ditetapkan. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah dalam sektor lembaga keuangan yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maju pesatnya lembaga tersebut. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulasi penengah mengayomi kehendak syariah (Ajuna 2019).

Pada tahap penyusunan anggaran, terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan menciptakan senjangan dalam anggaran. Faktor-faktor tersebut diantaranya partisipasi anggaran, Nurfaizah (2007) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan partisipasi aparat pemerintah daerah yang mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Partisipasi diperlukan dalam penyusunan anggaran, hal ini dikarenakan bawahan lebih mengetahui kondisi unit organisasinya.

Apabila seluruh anggota organisasi dapat berpartisipasi serta terlibat dalam menentukan langkah untuk menentukan tujuan dalam penganggaran, maka tujuan yang terdapat dalam anggaran akan mudah terealisasi. Individu yang terlibat dalam proses penganggaran dapat mempengaruhi senjangan dalam anggaran, hal tersebut dinilai dari sejauh mana individu tersebut mampu menentukan prioritas antara kepentingan sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasi.

Individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran haruslah seseorang yang memiliki kapasitas yang baik. Berkaitan dengan proses penganggaran, maka individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu mengalokasikan sumberdaya secara optimal, dengan demikian dapat memperkecil resiko senjangan dalam anggaran (Venusita, 2009). Kapasitas individu menurut Tresnayani dan Gayatri (2016) merupakan sebuah penilaian teknis atas apa yang dilakukan oleh individu untuk melaksanakan sesuatu yang dalam hal ini untuk meningkatkan produktifitas kerja.

Nugrahaini dan Sugiri (2004) mengemukakan bahwa kaitannya dengan senjangan anggaran yaitu seseorang dengan self-esteem yang rendah cenderung lebih tinggi dalam menciptakan senjangan anggaran. Proses penyusunan anggaran juga diperlukan kejelasan

terhadap sasaran anggaran. Agar anggaran lebih produktif, perlu adanya penetapan tujuan secara spesifik. Penetapan anggaran yang spesifik akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi tercapainya tujuan yang dikehendaki sehingga berpengaruh pada peningkatan kinerja.

Sasaran atau disebut dengan target dalam konteks pemerintah daerah merupakan hasil yang di inginkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 43). Kecamatan Kota Tengah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Gorontalo yang terdiri dari 6 desa. Berdasarkan data ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2021, Kecamatan Kota Tengah terindikasi mengalami senjangan anggaran. Hal ini terlihat dari tabel realisasi anggaran yang menunjukkan terdapat 6 desa di Kecamatan Kota Tengah mengalami senjangan anggaran yang cukup tinggi. Berikut prosentase laporan realisasi APBDes 6 desa yang mengalami senjangan anggaran cukup tinggi tahun 2021. Di Gorontalo sendiri, pengelolaan anggaran desa digadang-gadang memiliki nilai kearifan local yakni huyula sehingga anggaran berbasis kerja sama (Belebele Dkk 2021).

**Tabel 1.1 Realisasi anggaran APBDes Kecamatan Kota Tengah 2021**

Nama Kelurahan	Persentase Anggaran Pendapatan	Persentase Anggaran Belanja
Wumialo	100,02%	99,69%
Dulalowo	100,36%	91,22%
Liluwo	100,20%	95,10%
Pulubala	100,00%	79,11%
Paguyaman	100,00%	79,11%
Dulalowo Timur	100,11%	98,80%

Sumber: BPS Kota Gorontalo

Berdasarkan data presentase laporan realisasi APBDes pada tabel diatas, mencerminkan indikasi adanya senjangan anggaran desa di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Indikasi adanya senjangan anggaran ini dapat dilihat dari realisasi anggaran pendapatan yang lebih tinggi daripada jumlah anggaran yang ditargetkan sebelumnya. Disisi lain realisasi belanja lebih kecil dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebelumnya.

Hal ini diduga dilakukan agar kinerja pemerintah desa terlihat bagus, karena pemerintah desa terlihat mampu menghemat belanja. Dari 6 desa yang ada, hanya terdapat satu desa yang mampu merealisasikan anggaran belanja 100%. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 5 desa belum mampu untuk melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo masih sedikit desa yang mampu untuk menetapkan target lebih realistis dan lebih baik.

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori keagenan merupakan teori yang mempelajari hubungan atau keterkaitan pihak-pihak yang memiliki jalinan hubungan fungsional dan struktural, yaitu prinsipal dan agen. Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Basyir (2016) teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pada penelitian ini teori agensi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan dalam proses penyusunan anggaran terutama saat bawahan menargetkan anggaran.

### **Partisipasi Anggaran**

Menurut Dharmanegara (2010) partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan secara bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, dengan kata lain pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya. Ikhsan (2007) menyatakan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan suatu metode dalam penganggaran dengan tujuan untuk memperoleh anggaran yang objektif, dalam partisipasi penganggaran semua tingkat manajemen terlibat dalam penyusunan dan pengembangan anggaran. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa partisipasi bawahan yang lebih tinggi dalam proses penganggaran mengarah pada senjangan anggaran yang lebih besar, hal ini dikarenakan tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi daerah pada saat proses pengambilan keputusan terkait dengan penganggaran. Pradani dan Erawati (2016) juga mengemukakan bahwa bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan cenderung

menimbulkan senjangan anggaran (budgetary slack) untuk menghindari resiko ketidakpastian masa mendatang.

### **Kapasitas Individu**

Tresnayani dan Gayatri (2016) menyatakan bahwa kapasitas individu atau kemampuan merupakan sebuah penilaian teknis atas apa yang dilakukan oleh individu untuk melaksanakan sesuatu yang dalam hal ini untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. Maskun (2009) menyatakan apabila pengetahuan yang dimiliki oleh individu penyusun anggaran tidak cukup, akan mengakibatkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu akan memperbesar kecenderungan untuk melakukan senjangan terhadap anggaran. Kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu, terbentuk dari proses pendidikan baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, maupun pengalaman. Pendidikan formal diperoleh melalui sekolah, sedangkan pendidikan non formal diperoleh melalui pelatihan/pelatihan keuangan. Pendidikan formal dan non formal merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja seseorang. Harnia (2021) Pendidikan non formal sangat ditentukan oleh lingkungan sekitar kehidupannya

Proses penganggaran sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia setiap individu (Sahabi dan Suleman 2022), individu yang memiliki pengetahuan yang cukup akan mampu mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal, mampu menghadapi dan mengantisipasi ketidakpastian lingkungan terutama isu mengenai senjangan anggaran, hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya senjangan dalam anggaran. Organisasi sektor publik dalam era otonomi daerah perlu untuk menyiapkan tenaga kerja atau aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan yang baik.

Aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Lestara et al (2016) menyatakan bahwa berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pengetahuan individu yang tinggi dapat meminimalisir tingkat senjangan anggaran. Namun dalam prakteknya, semakin tinggi

kapasitas individu justru memunculkan anggapan bahwa senjangan anggaran semakin meningkat

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Karakteristik dalam anggaran salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran dalam konteks pemerintah daerah tercakup dalam rencana strategik daerah dan program pembangunan daerah. Adanya sasaran yang jelas akan memudahkan individu dalam menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target dalam anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Menurut Sari dan Putra (2017), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Agar anggaran yang disusun lebih produktif, perlu adanya penetapan tujuan secara spesifik.

Penetapan tujuan dengan spesifik akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran atau disebut dengan target merupakan hasil yang diinginkan dari suatu program keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 43).

Keluaran yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 43 adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam program dan kebijakan. Hasil yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dari suatu pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan (Pitasari, 2014). Pencapaian target anggaran akan lebih mudah tercapai apabila pihak penyusun anggaran mengerti mengenai rencana yang akan dilaksanakan.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dan sampel Penelitian ini dilakukan di desa yang berada di Kecamatan Kota Tengah yang berjumlah 6 desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah desa Kecamatan Kota Tengah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah

aparat pemerintah desa di Kecamatan Kota Tengah yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran diantaranya: Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Sekertaris Desa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dengan pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, kapasitas individu, kejelasan sasaran anggaran, terhadap senjangan anggaran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert .

Teknik yang digunakan yaitu Purposive Sampling, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji Multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kuisisioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 50 kuisisioner dan kuisisioner kembali sebanyak 48 kuisisioner, sedangkan kuisisioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 43 kuisisioner. Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi moderasi dengan menggunakan software SPSS 23.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan sampel sebanyak 43 responden. Validitas diukur dengan melihat nilai signifikansi pada hasil korelasi bivariante pada kolom Correlation. Selain itu, dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel sebesar 0,1461 pada taraf signifikansi 5%. Rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Uji Instrumen Penelitian**

Variael	Indikator	Koefesien Korelasi	Nilai Signifikasi	Kesimpulan
Partisipasi Penganggaran (X1)	PP1	0.613	0.000	Valid
	PP2	0.756	0.000	Valid
	PP3	0.755	0.000	Valid
	PP4	0.654	0.000	Valid
	PP5	0,747	0.000	Valid
	PP6	0.701	0.000	Valid
	PP7	0.803	0.000	Valid
Kapasitas Individu (X2)	KI1	0.52	0.000	Valid
	KI2	0,587	0.000	Valid
	KI3	0.601	0.000	Valid
	KI4	0.519	0.000	Valid
	KI5	0,323	0.000	Valid

	KI6	0,576	0.000	Valid
	KI7	0.680	0.000	Valid
	KI8	0.621	0.000	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	KSA1	0.765	0.000	Valid
	KSA2	0.734	0.000	Valid
	KSA3	0.651	0.000	Valid
	KSA4	0.741	0.000	Valid
	KSA5	0.732	0.000	Valid
	KSA6	0.712	0.000	Valid
Senjangan Anggaran (X4)	SA1	0,760	0.000	Valid
	SA2	0,708	0.000	Valid
	SA3	0.741	0.000	Valid
	SA4	0.666	0.000	Valid
	SA5	0.604	0.000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, semua instrumen penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,1460). Dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan sampel sebanyak 43 responden. Reliabilitas diukur dengan melihat besarnya nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel yang diuji. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Sekaran dan Bougie, 2017). Rekapitulasi hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Partisipasi Penganggaran (X1)	7	0,885	0,6	Reliabel
Kapasitas Individu (X2)	8	0,643	0,6	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	6	0,721	0,6	Reliabel
Senjangan Anggaran (Y)	5	0,754	0,6	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian yaitu variabel partisipasi penganggaran, penekanan anggaran, locus of control, kapasitas individu, dan senjangan anggaran diperoleh hasil bahwa semua variabel penelitian

memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. Dengan demikian, kuesioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan berdistribusi normal bila koefisien asymp sign (2-tailed) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil analisis uji KolmogorovSmirnov dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.4 Hasil Uji Normalitas**

	<b>Unstandardized Residual</b>
N	43
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,061

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa semua variabel memiliki nilai kolmogorov smirnov  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,061. Sehingga, dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi dikatakan baik, jika tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Gangguan multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Data penelitian dikatakan bebas multikolinieritas jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai Tolerance  $> 0,1$  (Ghozali, 2018). Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini:

**Tabel 1.5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Partisipasi Penganggaran (X1)	0,655	1,526	Tidak terjadi multikolinieritas
Kapasitas Individu (X2)	0,722	1,370	Tidak terjadi multikolinieritas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,797	1,269	Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ). Sementara, nilai Tolerance masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,1 (nilai Tolerance  $> 0,1$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik, yaitu uji Geljser. Tidak terjadinya heteroskedastisitas ditandai dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% (Ghozali, 2018). Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini:

**Tabel 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel Independen	Signifikansi	Keterangan
Partisipasi Penganggaran (X1)	0,535	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kapasitas Individu (X2)	0,186	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,246	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran pada Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi penganggaran, maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran juga semakin meningkat. Kejelasan Sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak dapat memoderasi dalam hubungan antara partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran pada Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Hal ini berarti bahwa variabel Kejelasan Sasaran anggaran tidak mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Kapasitas individu tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak dapat memoderasi dalam hubungan antara partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran pada Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Hal ini berarti bahwa variabel kapasitas individu tidak mampu memoderasi hubungan antara partisipasi penganggaran dengan senjangan anggaran.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adikusuma, Musa, dan H. Mukhzarudfa. 2017. "Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Kapasitas Individu, Komitmen Organisasi, Locus of Control sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi* 2 (3): 56–72. Doi: 10.22437/jaku.v2i3.4698.
- Ajuna, L. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *ASY SYAR'IIYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(2), 170 - 192. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>
- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2015. "*Pengaruh* Penganggaran Partisipatif pada Budgetary Slack dengan Asimetri Informasi, Self Esteem, Locus Of Control dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi: Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana, Bali." Tesis, Universitas Udayana Denpasar.
- Belemebe, L., Muhibbuddin. M., Ajuna, L. H. (2021). Keuangan Sosial Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula pada Masyarakat Gorontalo Indonesia. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2(2). 116-

134. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.160>

- Diansari, Rani Eka, dan Meilia Saraswati. 2020. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, dan Ambiguitas Peran terhadap Budgetary Slack (Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta).” *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17 (2): 418–426. Doi: 10.31316/akmenika.v17i2.1045.
- Harnia, S. (2021). The Role of Islamic Phylantropic Institutions in Distribution of ZIS During Ramadhan to the Community in Deme 2 Village North Gorontalo, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.54045/talaa.v1i1.247>
- Kahar, Suleman H. A., dan Asrudin Hormati. 2017. “Peran Budget Emphasis dalam Memoderasi Hubungan Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan dan Kinerja Manajerial (Studi pada 30 SKPD Kota Ternate).” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14 (1): 71–88. Doi: 10.14710/jaa.v14i1.18224
- Khasanah, Sulis Nafisatun, dan Ika Neni Kristanti. 2020. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kapasitas Individu, Self Esteem dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Tenjangan Anggaran Desa di Kecamatan Petanahan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (3): 411–425. Doi: 10.32639/jimmba.v2i3.487.
- Maheni, Ni Made Dwi, dan I Made Pande Dwiana Putra. 2018. “Pengaruh Penekanan Anggaran dan Kapasitas Individu terhadap Senjangan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23 (3): 2009–2033. Doi: 10.24843/eja.2018.v23.i03.p15
- Maskun, Ali. 2009. “Faktor Etika, Budaya Birokrasi, Tekanan Sosial dan Kapasitas Individu terhadap Budgetary Slack (Senjangan Anggaran) (Kajian Perilaku Eksekutif dalam Proses Penyusunan Anggaran di Badan Koordinator Wilayah II Jawa Timur).” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7 (1): 162–172
- Putri, Selly Oberty Dany Adana, Dwiati Marsiwi, dan Ika Farida Ulfah. 2018. “Penekanan Anggaran, Kapasitas Individu dan Group Cohesiveness terhadap Kecenderungan Menciptakan Budgatary Slack pada Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri).” *Jurnal ISOQUANT: Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2 (1): 56–66. Doi: 10.24269/iso.v2i2.191.g188
- Sabihi, F. H., & Suleman, T. (2022). Prospects of Developing Islamic Financial Institutions in North Bolaang Mongondow Regency, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.436>
- Sari, Ni Luh Eka Yuni, dan I Nyoman Wijana Asmara Putra. 2017. “Kapasitas Individu, Self Esteem, Komitmen Organisasi, dan Penekanan Anggaran Memoderasi Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20 (2): 1189–1218. Doi: 10.24843/EJA.2017.v20.i02.p12
- Sahabi, A., Yusuf, S. D., Mohamad, R., & Syawaluddin, S. (2022). MASLAHAT DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DI KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN. *Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2), 61-70.

Tresnayani, Luh Gede Ardi, dan Gayatri. 2016. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Kapasitas Individu, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Potensi Terjadinya Budgetary Slack." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 16 (2): 1405–1432